

EKSISTENSI PERDA-PERDA SYARIAT DI KABUPATEN TAKALAR

(Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ABDURRAHMAN SUPARDI USMAN

NIM: 10500111005

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURRAHMAN SUPARDI USMAN
NIM : 10500111005
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 1 Maret 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum, Strata satu
Alamat : Takalar
Judul : Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar
(Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Takalar, 01 Maret 2015

Penyusun,

Abdurrahman Supardi Usman
NIM: 10500111005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis yuridis, Politis dan konstitusional)”, yang disusun oleh Abdurrahman Supardi Usman, NIM: 10500111005, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diseleggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 10 Maret 2015 M.
19 Jumadil Awal 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum. (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

Munaqisy II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Drs. M. Tahir Maloko, M.HI. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt. atas limpahan kasih, sayang berserta segala transendenitas nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **EKSISTENSI PERDA-PERDA SYARIAT DI KABUPATEN TAKALAR (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)** dapat dilesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kompleksitas dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah menjadi obstruksi, oleh karena hadirnya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Supardi Usman Dg. Mannang, S.Ip., M.Si. dan Ibunda Layana Dg. Sugi atas romantisme keluarga, kompleksitas edukasi, serta dukungan moral dan finansial yang diberikan.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., selaku PgS Rektor UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Dr. Hamsir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Istiqamah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum atas

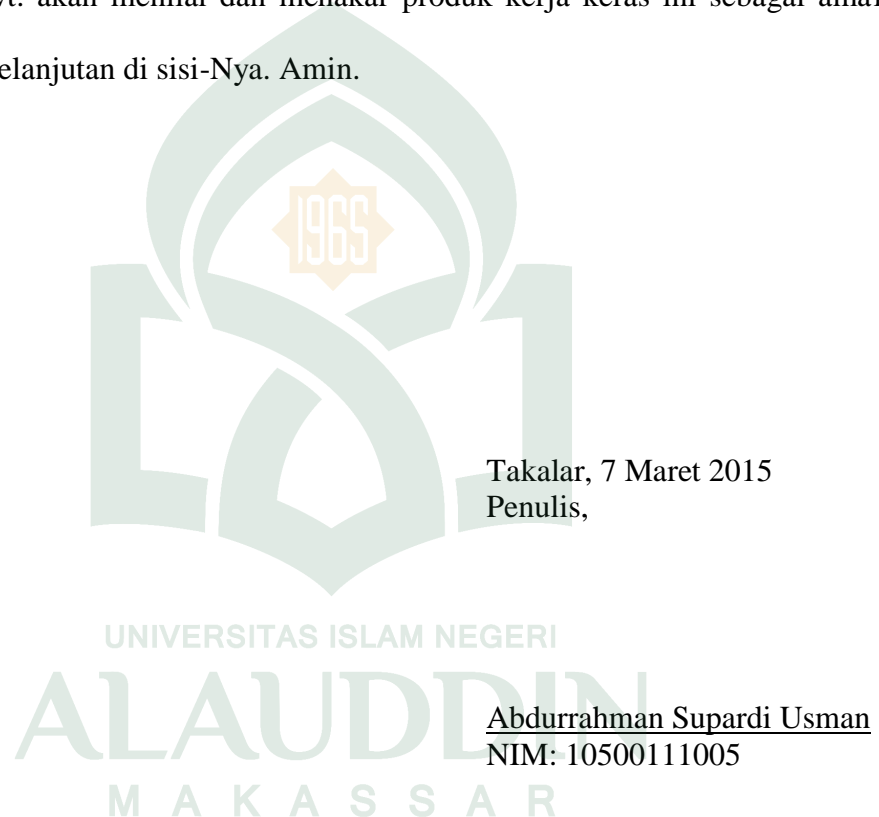
ketersediaan sarana dan prasarana akademis maupun administratif yang memudahkan terselesaikannya skripsi ini.

5. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Drs. M. Tahir Maloko, M.H.I. atas arahan dan petunjuk yang diberikan sebagai pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar atas teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama proses menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Rekan-rekan seperjuangan: Prihatini Hudahanin, Andri Maulana, Agusriani, Andi Jaya Kasma, Ashar Natsir, Andri Serti P., Amrullah Nur Hidayat, Nurchaliq Majid, Didin Darmadin, serta saudara-saudari Ilmu Hukum 2011 tanpa terkecuali. Oleh karena motivasi, empati, inspirasi dan kontribusi yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Mr. Leonard Kleinrock (Penemu Internet), Mr. Lawrence Edward Page dan Mr. Sergey Mikhailovich Brin (Pendiri Google), Mr. Lawrence G. Tesler (penemu *cut/copy-paste*), serta Mr. Charles Simonyi (Penemu *Office Word*) atas inovasi dan penemuannya yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu.

Besar harapan agar skripsi ini dapat berimplikasi positif dalam perkembangan hukum di Indonesia, baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Namunpun demikian,

ungkapan *tak ada gading yang tak retak* tentunya tetap menjadi representasi citra dari skripsi ini yang tak mampu menyentuh kesempurnaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Semoga Allah swt. selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt. akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12-22
A. Perda Syariat	12
B. Perspektif Yuridis Konstitusional dan Politis	18
C. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23-26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Instrumen Penelitian.....	25
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
G. Pengujian Keabsahan Data.....	26
BAB IV EKSISTENSI PERDA-PERDA SYARIAT DI KABUPATEN TAKALAR.....	27-66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Perspektif Yuridis Konstitusional	33
C. Perspektif Politis	58
BAB V PENUTUP.....	67-71
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian.....	70

DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxi
RIWAYAT HIDUP	xxxvii



PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّامْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* يَا اللَّهُ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

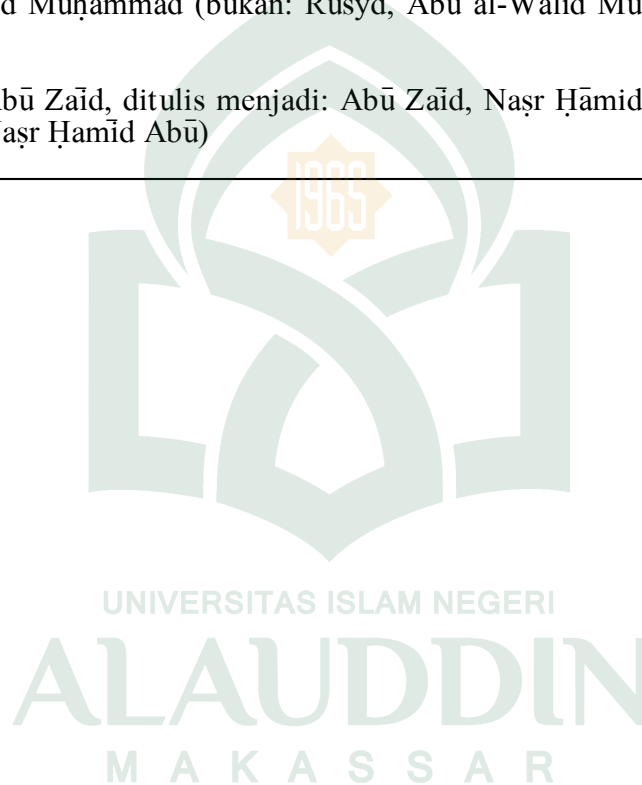
Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)



ABSTRAK

Nama : Abdurrahman Supardi Usman
NIM : 10500111005
Judul : Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)

Sebagai daerah berpenduduk mayoritas muslim dengan persentase mencapai 99,77%, Kabupaten Takalar melalui pemerintahnya berusaha menjamin hak-hak kehidupan beragama masyarakatnya. Bentuk penjaminan hak-hak tersebut selanjutnya terinterpretasi ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang selanjutnya familiar disebut Perda Syariat. Adapun Perda-Perda Syariat yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2006 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

Melaui penelitian ini, penulis mencoba memandang keberadaan Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar melalui perspektif yuridis, politis dan konstitusional. Selanjutnya terekstraklah rumusan masalah berupa bagaimana Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif Yuridis Konstitusional? dan Bagaimana eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis? Rumusan masalah pertama berorientasi pada kesesuaian Perda-Perda tersebut dengan konsepsi sistem hukum Friedman dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Sedangkan rumusan masalah kedua mengacu pada dasar kebijakan dan kontinuitas implementasi.

Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian hukum normatif, juga mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kualitatif. Sedangkan secara metodik, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Adapun menurut tingkat eksplanasi dari

penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, politis dan pendekatan konstitusional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar segi substansi hukum merupakan bentuk positifisasi norma yang bersumber dari hukum Islam menjadi kaidah hukum positif. 2) Ditinjau dari struktur hukum, perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar legal ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Kepolisian. 3) Ditinjau dari segi kultur hukum, eksistensi Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar didukung oleh kultur dan budaya masyarakat Takalar yang cenderung religius oleh karena hasil akulturasi peradaban Makassar dan Islam. 4) Berdasarkan elaborasi penulis, tidak ditemui pelanggaran konstitusional oleh perda-perda tersebut. 5) lahirnya Perda-perda tersebut didasari inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk mengakomodir aspirasi bersyariat masyarakat Takalar yang mayoritas beragama Islam. 6) Kekurangan dalam pelaksanaan perda-perda tersebut dapat ditemui pada lemahnya penegakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah menghadirkan perspektif baru terkait Peraturan Daerah (bernuansa) Syariat. Bahwa benar secara positivistik Perda Syariat tidaklah dikenal dalam pergaulan hukum nasional. Akan tetapi Peraturan Daerah dengan nuansa dan berangkat dari norma Syariat adalah benar pula adanya dan nyata eksistensinya. Selain itu, menghadirkan pula perspektif baru terhadap *base line* Perda (bernuansa) Syariat di Kabupaten Takalar bukan sebatas berasal dari ajaran agama Islam, melainkan juga berasal dari produk akulturasi dan kulturisasi peradaban Makassar-Islam.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kab. Takalar agar penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Takalar dapat dijalankan secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup keberlakuannya, tidak parsial serta tidak bersifat sporadis semata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Takalar adalah kabupaten yang secara astronomis terletak antara 5°3'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Di sebelah timur secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan di batasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.¹

Dengan populasi mencapai 269.603 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga) jiwa, 268.995 (dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) jiwa di antaranya beragama Islam. Dengan kata lain 99,77% penduduk Kabupaten Takalar beragama Islam.²

Sebagai daerah berpenduduk mayoritas muslim dengan persentase mencapai 99,77% tersebut, Kabupaten Takalar melalui pemerintahnya berusaha menjamin hak-hak kehidupan beragama masyarakatnya. Bentuk penjaminan hak-hak tersebut selanjutnya terinterpretasi lebih luas ke dalam dimensi perangkat rekayasa sosial yang teraplikasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2008* (Takalar: BAPPEDA, 2008), h. 1.

²Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," *situs resmi BPS*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/table?tid=321&wid=7300000000> (30 Maret 2013).

Menjadi unik dalam peradaban hukum modern bahwa peraturan daerah memungkinkan diri untuk meresap dan mengatur domain privat masyarakatnya. Akan tetapi hal ini menjadi rasional dan relevan mengingat kompleksitas agama Islam dalam mengikat dan melekatkan setiap person penganutnya. Ikatan kompleks ini tertuang dalam satu wadah yang familiar disebut syariat dalam wawasan Islam. Syariat sendiri menjadi dimensi yang (seharusnya) tidak terpisahkan dengan manusia muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al- Jāsyiyah/45: 18, sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.³

Semangat pembangunan ekosistem syariat di Kabupaten Takalar selanjutnya dapat dilihat dari peran aktif pemerintah daerah. Peran aktif tersebut dapat diukur dengan lahirnya perda-perda syariat yang menyentuh masyarakat Kabupaten Takalar. Perda-perda tersebut diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol,

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. (Cet. IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013). h. 636.

Narkotika dan Obat Psikotropika, serta Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar.

Kehadiran perda-perda ini tentunya menjadi media pelengkap dan pendukung terwujudnya ekosistem syariat dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten Takalar. Misalnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) tepatnya pada pasal 3 ayat (2), bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar maka murid-murid SD yang beragama Islam di Kabupaten Takalar diwajibkan mampu baca tulis Al-Qur'an dengan standarisasi tertentu.⁴ Para murid SD dan MI yang beragama Islam diwajibkan terlebih dahulu menguasai baca tulis Al-Qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah yang menyatakan kelulusan terhadap ujian dari tim penguji yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Setiap eksistensi akan memicu kelahiran perspektif yang beragam. Demikian pula halnya eksistensi perda-perda dengan semangat syariat di Kabupaten Takalar ini, tentunya dapat dianalisa dari berbagai perspektif pula. Dalam perspetif konstitusional misalnya, bahwa apakah kehadiran perda-perda yang mengatur dimensi keagamaan tidak menjadi sebuah bentuk pelampauan atau tumpangtindih kewenangan. Bukankah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara telah mengatur

⁴Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, bab III, pasal 3.

bahwa urusan agama menjadi salah satu dari enam urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat.

Menilik dalam romantisme hukum, norma menjadi faktor yang meliputi *legal culture* dalam setiap peradaban hukum. Norma agama menjadi salah satu faktor kuat dalam pergaulan hukum di Indonesia. Norma agama menurut Kansil adalah sebuah aturan hidup berupa perintah, larangan, dan anjuran yang diterima manusia dari Tuhan. Para pemeluk agama meyakini bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan menuju jalan hidup yang benar.⁵ Jika norma agama adalah sebuah norma hukum yang sakral, religius dan suprarasional, apakah ia harus ditransformasikan menjadi sebuah kaidah hukum.

Salah satu ciri norma agama adalah sanksi yang bersifat ukhrawi yang direpresentasikan dalam bentuk dosa. Norma ini mengikat dengan iman bahwa pelanggaran akan diganjar di akhirat kelak. Hal ini menjadi jiwa dari setiap norma agama dalam masyarakat bahwa iman-lah yang menjadikan norma agama menjadi berbeda dan sakral. Namun dalam konteks kekinian, sakralitas iman tersebut nampak terdegradasi oleh keadaan yang mengharuskan intervensi oleh perda dalam mengatur perilaku keimanan masyarakat beragama. Hal ini disebabkan oleh hukum formal yang mengharuskan umat beragama memahami dan menjalankan hukum agamanya sesuai interpretasi Pemerintah Daerah terhadap aturan agama tersebut.

⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 52.

Misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, tepatnya pada pasal 7 ayat (1) yang mengancam setiap konsumen, produsen, dan distributor minuman keras beralkohol dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁶ Adapun bagi pemeluk agama Islam, Allah swt. telah melarang konsumsi *khamr* atau minuman keras. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Māidah/5: 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁷

Beriring dengan perintah menjauhi minuman keras tersebut, terdapat pula sanksi yang mengancam para peminum khamar. Jika seorang muslim meminum khamar atau

⁶Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika*, bab V, pasal 7.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 142.

meminum sesuatu yang dicampur dengannya maka wajib ditegakkan hukuman atas dirinya. Batas hukuman bagi peminum khamar adalah delapan puluh kali cambukan⁸

Dilihat secara sepintas semangat yang sama dapat dirasakan saat menyandingkan antara aturan hukum formal dan aturan Syariat Islam. Namun dengan telaah lebih jauh tentunya umat Islam di Kabupaten Takalar akan diperhadapkan pada pilihan spiritual: apakah meninggalkan konsumsi miras tersebut dikarenakan oleh kepatuhan menjauhi larangan Tuhan atau hanya dikarenakan ketakutan akan ancaman sanksi dari Peraturan Daerah? Padahal konstitusi dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 jelas menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁹ Terdengar menggelitik ketika transformasi norma agama menjadi kaidah hukum tersebut diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk intervensi yang mencederai kebebasan spiritual masyarakat muslim.

Menarik untuk ditelaah mengenai eksistensi perda syariat dalam jajaran hierarki perundang-undangan Indonesia. Apakah keberadaannya dapat didefinisikan tidak bermasalah secara konstitusi ataukah sebaliknya. Apakah urgensi pembentukannya memang relevan dengan tuntutan *socio-religi* dalam konteks kekinian ataukah keberadaannya hanya bagian dari alat rekayasa sosial?

⁸Shalih bin fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqh lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 1064.

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab XI, pasal 29.

Dilatarbelakangi oleh pembahasan-pembahasan awal tersebut, maka menjadi penting dan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Eksistensi Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berlandaskan dari latarbelakang tersebut maka tercapailah fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar;
- 2) Perspektif yuridis konstitusional dan politis terhadap Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar;

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam pointer-pointer fokus tersebut, maka fokus penelitian tersebut terdahulu dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:

Syariat dapat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia atau hubungan manusia dengan Allah swt. Serta dapat pula diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-qur'an dan hadis.¹⁰ Penggunaan kata syariat dalam pergaulan bahasa Indonesia selanjutnya menjadi lekat dengan agama Islam. Adapun dalam penulisan skripsi ini, kata syariat

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 984.

disandingkan dengan kata perda sehingga menjadi sebuah frasa tersendiri yaitu perda syariat. Frasa perda syariat dihadirkan sebagai representasi dari peraturan-peraturan daerah di Kab. Takalar yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2006 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

Adapun perspektif yuridis konstitusional terkait bagaimana Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar menjalankan fungsi eksistensinya dalam dimensi sistem hukum dan dimensi konstitusionalme. Sedangkan perspektif politis yang dimaksudkan adalah cara pandang terkait apa yang menjadi landasan kebijakan lahirnya perda-perda tersebut dan bagaimana kontinuitas implementasinya.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis konstitusional?
- 2) Bagaimana eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis?

D. Kajian Pustaka

Untuk Skripsi berjudul “Eksistensi Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”, dari hasil penelusuran

yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku yang dengan pembahasan yang relevan dengan Penelitian ini . Adapun buku-buku tersebut adalah:

1) Hubungan antara Negara dan Agama (Studi Pemikiran Buya Hamka)

karya Ahmad M. Sewang. Buku ini membahas tentang ciri khas agama Islam terkait hubungan agama dan negara. Paham sekuleris yang bermaksud memisahkan antara fungsi-fungsi negara dengan dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi agama, tidaklah berlaku pada Islam. Oleh karena kompleksitas Islam tidaklah sekedar agama dalam arti religi, tetapi mencakup ideologi dan kehidupan secara universum. Dalam Islam, menegakkan kebenaran dan menjalankan keadilan adalah sebuah kewajiban syariat yang penting dan asasi. Selanjutnya jika dalam pelaksanaan dari kewajiban itu tidaklah mungkin dapat tercapai secara koheren tanpa adanya *tool of social engineering*, maka pengadaan alat tersebut (berupa kaidah hukum) dengan sendirinya menjadi sebuah kewajiban.¹¹

2) Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah oleh W.

Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. Membahas pemikiran Bagir Manan, bahwa idealnya ada empat hal yang melandasi penyusunan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, yaitu: landasan

¹¹Ahmad M. Sewang dan Syamsudduha Saleh, *Hubungan Agama dan Negara (Studi Pemikiran Buya Hamka)* (Makassar: Alauddin Press, 2011). h. 67.

yuridis, sosiologis, filosofis dan politis.¹² Hal ini tentunya juga berlaku bagi penyusunan peraturan daerah oleh karena peraturan daerah juga merupakan bagian dari perundang-undangan. Keempat aspek ini tentunya diharapkan melandasi pembentukan peraturan daerah guna terwujudnya peraturan daerah yang tangguh dan berkualitas.

- 3) Hukum Pemerintahan Daerah oleh Martin Jimung. Mengemukakan bahwa otonomi daerah dipilih dalam sebuah negara kesatuan dengan beberapa alasan, antara lain: membebaskan pusat dari beban mikronasional, keinginan terhadap pemberdayaan lokal, untuk menyalurkan alokasi kewenangan pusat ke daerah, pengembalian kepercayaan pusat ke daerah, dan semangat desentralisasi.¹³ Sejatinya otonomi daerah selain memberikan wewenang pada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, juga memberikan ruang fokus bagi pemerintah pusat untuk berkonsentrasi pada kebijakan strategis makronasional.
- 4) Relasi Agama dan Negara: Redefenisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia oleh Yudi Junadi. Memandang bahwa kelahiran dan keberlangsungan eksistensi perda-perda yang bersumber dari hukum-hukum syariat Islam (selanjutnya familiar disebut dengan perda syariat)

¹²W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).

¹³Martin Jimung, "Hukum Pemerintahan Daerah", dalam Hendra Karianga, *Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013)., h. 77

merupakan bentuk pelemahan bagi penciptaan tatanan keadilan. Menurutny, perda syariat bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua.¹⁴

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis konstitusional.
- 2) Untuk mengetahui eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis.

Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- 1) Media pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang berminat mengkaji problematika perda di Indonesia.
- 2) Rekomendasi wacana bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan peraturan daerah (perda), baik di Kab. Takalar ataupun daerah lain.

¹⁴Yudi Junadi, *Relasi Agama dan Negara: Redefenisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012). h. xvi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perda Syariat

1. Peraturan Daerah

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam desentralisasi politik atau *staatskundige decentralisatie* terjadi pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di bidang pemerintahan atau *regelende en besturende bevoegheiden* kepada unit-unit pemerintahan daerah otonom.¹⁵ Dalam pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan, peraturan daerah sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam relasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi cerminan dari manfaat otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶ Sedangkan di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 295

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, bab IX, pasal 236.

kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁷

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.¹⁸

2. Syariat

Syariat yang selanjutnya menjadi identik dengan شريعة إسلامية (syarīat Islamīyyah) adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.¹⁹

Diperlukan sebuah pengenalan terhadap hukum Islam untuk dapat menyentuh interpretasi syariat. Islam adalah agama yang mengikat penganutnya secara utuh dengan tidak memisahkan dimensi material dan dimensi non-material dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu dalam hukum atau syariat Islam, aturan-aturan yang muncul tidak hanya permasalahan terkait iman dan alam ukhrawi, bahkan diatur sampai ke hal-hal duniawi.

Berdasarkan hierarkis, sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, al-Hadis, dan al-ijtihad. Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut:

¹⁸“Peraturan Daerah,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), (13 April 2014)

¹⁹“Syariat Islam,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. (http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam). (13 April 2014).

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحابها معاذ (بن جبل) {{: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ؟ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولُ اللَّهِ}} (رواه أبو داود)²⁰

When the Apostle of Allah (peace be upon him) intended to send Mu'adh ibn Jabal to the Yemen, he asked: How will you judge when the occasion of deciding a case arises? He replied: I shall judge in accordance with Allah's Book. He asked: (What will you do) if you do not find any guidance in Allah's Book? He replied: (I shall act) in accordance with the Sunnah of the Apostle of Allah (peace be upon him). He asked: (What will you do) if you do not find any guidance in the Sunnah of the Apostle of Allah (peace be upon him) and in Allah's Book? He replied: I shall do my best to form an opinion and I shall spare no effort. The Apostle of Allah (peace be upon him) then patted him on the breast and said: Praise be to Allah Who has helped the messenger of the Apostle of Allah to find something which pleases the Apostle of Allah.²¹

Artinya:

Bahwasannya Hafish bin Umar bin Abi Aun dari Haribas bin Akhi al-Mughairah bin Syuaibah dari Anas dari sahabatnya, Mu'adz. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara? Ia (Mu'adz) menjawab: Saya akan menghukum dengan Kitabullah. Sabda beliau: Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah? Ia menjawab: Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bersabda: Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?. Ia menjawab: Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur. Maka Rasulullah saw. menepuk dada Mu'adz dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah menolong pembawa pesan Rasulullah.²²

²⁰al-Khāfizu Abī Dāwud Sulaimān Ibnu al-Asy'as al-Zajastāni al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (Suriah: Dārul Hadīs, 1973). h. 18-19.

²¹Imaanstar, *Bukhari, Muslim, Malik, & Abu Dawud Hadith Collection*, [software], Southern California MSA, 2006.

²²Abu Aufa, "Hadits Muadz bin Jabal", Abu Aufa Homepage, 2007. <http://aliph.wordpress.com/2007/06/13/hadits-muadz-bin-jabal/> (5 Juli 2014).

Hadis tersebut menggambarkan sumber-sumber hukum Islam secara hierarkis. Dimana al-qur'an menempati urutan pertama, setelah itu kemudian sunnah dan selanjutnya dengan ijtihad. Oleh karena terkadang ditemui gejala dalam kehidupan yang tidak di didapati lex specialis-nya dalam al-qur'an dan hadis, maka ditempuhlah jalur ijtihad.

Penetapan syariat Islam dalam konteks terapan menjadi erat kaitannya dengan penegak syariat yang diistilahkan dengan *أولي الامر* (ulil amri). Allah swt. Berfirman dalam Q.S. an-Nisā/4: 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²³

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut (berkaitan dengan istilah ulil amri) memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Adapun menurut Syekh Jalaluddin al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin as-Suyuti, dalam kitabnya Tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan *أولي الامر* adalah para penguasa, yakni jika mereka itu menyuruh agar menaati Allah dan

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. (Cet. IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013). h. 103.

rasul-Nya.²⁴ Sehingga dalam pembicaraan awal, *ūlīl amri* dapat dipahami sebagai pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3. Otonomi Daerah

Menurut sudut pandang etimologis, otonomi berarti pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomes* yang berarti pemerintahan. Sehingga menurut Widarta, otonomi bermakna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.²⁵ Adapun berdasarkan pasal 1 ayat 6. UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Idealnya penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktif, dan akuntabel melalui upaya-upaya koordinasi,

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 482

²⁵Widarta, "Cara Mudah Memahami Otonomi daerah", dalam Hendra Karianga, *Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 75-76.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, bab I, pasal 1.

pembinaan, pengawasan, dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah.²⁷ Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah diliputi oleh wewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Meskipun demikian, Kansil berpendapat bahwa otonomi daerah cenderung bersifat dinamis, dapat berkembang dan berubah sesuai dengan keadaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga selanjutnya ada kemungkinan penambahan penyerahan urusan kepada daerah secara bertahap. Berikut pula kemungkinan penarikan kembali suatu urusan yang telah diserahkan pada daerah. Bahkan, penghapusan dan penambahan daerah juga dimungkinkan.²⁸

B. Perspektif yuridis konstitusional dan politis

1. Perspektif Yuridis

Menurut perspetif linguistik, yuridis dapat diartikan sebagai padanan kata hukum. Dapat pula diartikan sebagai sifat sesuatu menurut hukum atau dapat pula berarti secara hukum.²⁹ Untuk itu, dalam upaya interpretasi makna dari kata yuridis maka hendaknya terlebih dahulu kita mengelaborasi makna dari hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pencarian jawaban dari pertanyaan “apa itu hukum?”, Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa:

²⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, bab II, pasal 6.

²⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 16.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1134.

There is, of course, no “true” definition of law. Definitions flow from the aim or function of the definer. ... Definitions that equate law with rules allow legal scholarship to ignore empirical questions and justify traditional legal thought.³⁰

Friedman memilih untuk mengkaji keutuhan hukum dalam kesatuan sebuah sistem atau *legal system* yang lazim dikenal dengan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Adapun menurut beliau, sistem hukum meliputi tiga aspek atau tiga dimensi yang saling mempengaruhi, yaitu: *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Dalam penjabarannya bahwa substansi hukum meliputi segala bentuk *rule* yang bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum. Sedangkan struktur hukum merupakan *skeletal framework, the institutional body of the system*. Adapun budaya atau kultur hukum merupakan *the element of the social attitude and value*, sebuah bentuk dari ragam bentuk *social forces*.³¹

2. Perspektif konstitusional

Berdasarkan wawasan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang dinisbatkan kepada konstitusi yaitu kata Yunani kuno *politeia* dan bahasa Latin *constitutio* yang erat kaitannya dengan kata *jus*. Menurut Charles Howard McIlwain penggunaan kedua istilah tersebut sebagai representasi dari:

All the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term and

³⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). h.10.

³¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-15.

as inclusive in its meaning as our own use of the word “constitution” when we speak generally of a man’s constitution or of the constitution of matter.³²

Pengertian konstitusi dapat dipahami dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusi sebagai *the natural frame of the state*. Kedua, konstitusi dalam arti *jus publicum regni* atau *the public law of realm*.

Prof. Carl Schmitt membagi konstitusi kedalam delapan interpretasi. Yaitu:

- a. Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) sebagai cermin dari *de reele machstfactoren*;
- b. Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) sebagai *Formarum* (vorm de vormen);
- c. Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) sebagai *Factor integratie*;
- d. Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) sebagai sebagai *Norma-normarum* (Norm de Normen);
- e. Konstitusi dalam arti relative (*Relative verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti materil (*constitutite in materiele zin*);
- f. Konstitusi dalam arti relatif (*relatieve verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti formal (*constitutie fermele zin*);
- g. Konstitusi dalam arti positif (*positieve verfassungsbegriff*);

³²Charles Howard McIlwain, “Constitutionalism: Ancient and Modern,” (New York: Cornell University Press, 1996), dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 295.

h. Konstitusi dalam arti ideal (*idealtbegriff de verfassung*);³³

Konstitusi dalam kaitannya dengan keberadaan perda syariat di Kabupaten Takalar mengarahkan kesan interpretasi konstitusi dalam arti relatif sebagai konstitusi dalam arti materil yaitu konstitusi yang implementasi turunannya terkait erat dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini tentunya komunitas masyarakat muslim di Kabupaten Takalar sebagai masyarakat mayoritas. Selanjutnya menjadi menarik untuk ditelaah dan diteliti terkait keberadaan perda syariat di Kab. Takalar, apakah konstitusional definitif ataukah inkonstitusional.

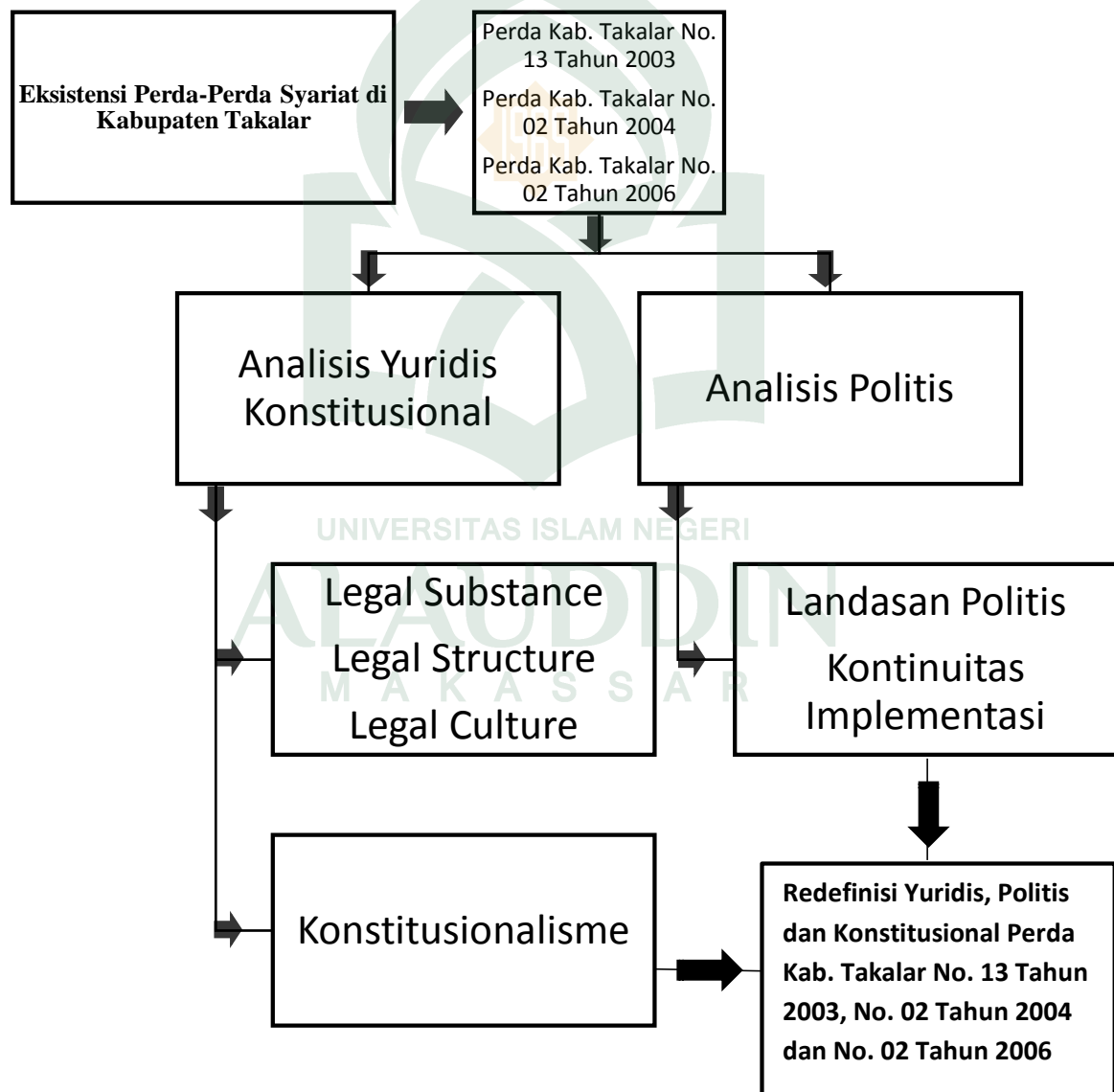
3. Perspektif Politis

Istilah politis terkait penggunaannya dalam penelitian ini tidaklah merujuk kepada istilah politik praktis melainkan politis dalam interpretasi terkait kebijakan dan kontinuitas implementasi dari keberadaan perda-perda syariat di Kab. Takalar yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2006 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

³³Carl Schmitt, "Verfassungslehre," (Berlin: Duncker & Humbolt, 1957), dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 296-297.

Selanjutnya dapat dilihat dan diteliti terkait landasan politis lahirnya perda-perda tersebut yang tentunya berkesinambungan dan berkorelasi erat dengan sejauh mana pemerintah daerah Kab. Takalar mempertahankan eksistensi dari perda yang telah dilahirkannya.

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian hukum normatif, juga mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kualitatif. Sedangkan secara metodik, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louise Kiddler mengemukakan bahwa penelitian evaluatif formatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari sebuah produk, program atau kebijakan yang menekankan pada efektivitas dari produk, program atau kebijakan tersebut.¹ Sedangkan menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan atau asosiasi dengan variabel lainnya.² Adapun lokasi penelitian berlangsung di Kabupaten Takalar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum.³

¹Louise Kiddler, “*Research Methods in Social Relation*”, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.

²Louise Kiddler, “*Research Methods in Social Relation*”, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, h. 11

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1134.

Meskipun denotasi kata yuridis lebih mengacu pada hukum nasional, akan tetapi pendekatan yang penulis maksudkan termasuk pula kata yuridis yang berkonotasi pada hukum Islam. Selain menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politis dan pendekatan konstitusional.

C. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang terdiri atas:

1) Data Primer

Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris.

2) Data Sekunder

Berupa berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis (nasional maupun Islam), *database software* dan artikel (*online* maupun *offline*).

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1) Elaborasi

Berupa penggarapan secara tekun dan cermat terhadap data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis, konstitusional dan politis guna memahami substansi interpretasi dari data tersebut.

2) Observasi

Berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.

3) Wawancara

Berupa proses tatap muka dalam rangka *interview* dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

4) Dokumentasi

Berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan referensi lain) sebagai data yang mendukung penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Kuesioner observasi

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam proses observasi. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi di lapangan.

2) Kuesioner wawancara

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam wawancara tatap muka dengan responden. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh pewawancara berdasarkan jawaban responden pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau dengan kata lain validasi penelitian ini dengan cara Trianggulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Lebih spesifik lagi jenis metode trianggulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi teknik. Trianggulasi teknik adalah metode validasi kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan atau kuesioner.⁴

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 372.

BAB IV

EKSISTENSI PERDA-PERDA SYARIAT DI KABUPATEN TAKALAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Fisik

Kabupaten Takalar adalah kabupaten yang secara astronomis terletak antara 5°3'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Di sebelah timur secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jenepono. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan di batasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.³⁴

Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km² terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Mangarabombang	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	45,27	7,99
3.	Sanrobone	29,36	5,18

³⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2008* (Takalar: BAPPEDA, 2008), h. 1.

4.	Polongbangkeng Selatan	88,07	15,54
5.	Pattallassang	25,31	4,47
6.	Polongbangkeng Utara	212,25	37,47
7.	Galesong Selatan	24,71	4,36
8.	Galesong	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	15,11	2,67
Kabupaten Takalar		566,51	100,00

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Takalar Menurut Kecamatan³⁵

2. Sejarah dan Pemerintahan

a. Sejarah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 maka ditetapkanlah Tanggal 10 Februari 1960 sebagai hari jadi Kabupaten Takalar. Sebelumnya, Takalar sebagai onder afdeling yang tergabung dalam daerah swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan *Onder Afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. *Onder afdeling* Takalar, membawahi beberapa *district* (adat *gemen chap*) yaitu:

³⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013* (Takalar: BAPPEDA, 2013), h. 4.

- 1) *District* Polombangkeng
- 2) *District* Galesong
- 3) *District* Topejawa
- 4) *District* Takalar
- 5) *District* Laikang
- 6) *District* Sanrobone

Setiap *district* diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali *District* Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo. Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

- 1) melalui lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) swatantra makassar. Perjuangan melalui legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H Dewakang Dg Tiro, Daradda Dg Ngambe, Abu Dg Mattola dan Abdul Mannan Dg Liwang.
- 2) melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H Makkaraeng Dg Manjarungi, Bostan Dg Mamajja, H. Mappa Dg

Temba, H Achmad Dahlan Dg Sibali, Nurung Dg Tombong, Sirajuddin Dg Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.³⁶

Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukota Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960, terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (pertama) adalah Bapak H Donggeng Dg. Ngasa, seorang Pamongpraja Senior.

³⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013*, h. 5

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka *District* Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, *District* Galesong dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, *District* Topejawa, *District* Takalar, *District* Laikang dan *District* Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 tahun 2007 Tanggal 27 April 2007 dan perda nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (pemekaran Dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang, Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 kelurahan.

b. Pemerintahan

Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan. Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Takalar terdapat 43 kantor jawatan/instansi. Lembaga Legislatif, DPRD Kabupaten Takalar beranggotakan 30 orang.

No.	Nama Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mangarabombang	11	1	12
2.	Mappakasunggu	8	1	9
3.	Sanrobone	6	-	6
4.	Polongbangkeng Selatan	4	6	10
5.	Pattallassang	-	9	9
6.	Polongbangkeng Utara	12	6	18
7.	Galesong Selatan	12	-	12
8.	Galesong	14	-	14
9.	Galesong Utara	9	1	10
Kabupaten Takalar		76	24	100

Tabel 2. Banyaknya Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Takalar³⁷

3. Deskripsi Antropologis

³⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013* (Takalar: BAPPEDA, 2013), h. 18.

Masyarakat Takalar terdiri dari berbagai macam latar belakang suku dan etnis. Penduduk asli masyarakat Takalar adalah Suku Makassar. Selain itu banyak juga pendatang dengan latar belakang suku dan etnis lain yang akhirnya menetap di Kabupaten Takalar, seperti Suku Bugis, Mandar, Jawa dan Etnis Tionghoa. Sebagai suku mayoritas dan latar belakang pribumi, adat istiadat Suku Makassar masih cukup kental terasa eksistensinya di Kabupaten Takalar.

Dengan populasi mencapai 269.603 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga) jiwa, 268.995 (dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) jiwa di antaranya beragama Islam. Dengan kata lain 99,77% penduduk Kabupaten Takalar beragama Islam.³⁸ Sehingga Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Kabupaten Takalar, menjadikan kesan religiositas begitu kuat terefleksi di kabupaten yang terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi ini.

Agama dan Syariat Islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Takalar. Kerajaan-kerajaan yang pernah hidup di daerah pra-kabupaten Takalar telah terlebih dahulu menerapkan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Seperti Kerajaan Laikang, Sanrobone, Polongbengkeng dan sebagainya. Sehingga masyarakat Kabupaten Takalar dalam konteks kekinian diikat dengan pola interaksi Islam Makassar. Dimana norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan bentuk penyesuaian antara falsafah *Siri'* dan Syariat Islam.

³⁸Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," *situs resmi BPS*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/table?tid=321&wid=7300000000> (30 Maret 2013).

B. Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar dalam Perspektif Yuridis Konstitusional

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia adalah negara hukum. Pondasi berbangsa dan bernegara di republik ini tidaklah berlandaskan dari hukum-hukum syariat Islam. Akan tetapi, membicarakan eksistensi syariat Islam dalam sistem hukum nasional negara ini tetap merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh karena bagi umat muslim, mematuhi syariat sebagai perintah Tuhan di muka bumi merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Namun, pada sisi lain umat muslim Indonesia sebagai bagian dari warga negara juga wajib menaati hukum nasional yang merupakan bentuk perjanjian luhur kesepakatan bersama antar elemen warga negara lainnya. Dalam konteks tersebut, pilihan Indonesia sebagai bentuk negara hukum (*rechstaat*) memberikan ruang inklusif bagi hukum adat maupun hukum agama untuk turut berkembang dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan dipilihnya bentuk negara hukum (*rechstaat*) tersebut adalah untuk menepis persepsi Indonesia sebagai negara kekuasaan (*matchstaat*) yang berpretensi menjadikan hukum sebagai alat kuasa sepihak.³⁹

Indonesia dalam implementasinya sebagai negara hukum (*rechstaat*), menganut teori hukum berjenjang (*stufen theory*) dari Hans Kelsen di mana dasar berlakunya dan legalitas suatu hukum terletak pada hukum yang ada di atasnya. Prinsip atau asas yang kemudian lahir dari penerapan teori ini adalah asas hukum *lex supperiore*

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 70.

derogat lex inferiori (hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya). Jika bertentangan, maka suatu aturan dapat dibatalkan demi hukum.⁴⁰

Asas hukum *lex superior derogat lex inferiori* tentunya telah menjadi realita dalam kehidupan dan pergaulan hukum di Indonesia. Sehingga hukum yang secara hierarkis berada dibawah tidaklah dibenarkan jika bertentangan dengan hukum yang ada diatasnya (secara hierarkis). Hal ini juga tentunya berlaku bagi peraturan-peraturan daerah di seluruh daerah-daerah otonom di Indonesia terhadap hukum nasional atau konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia sebagaimana yang diundangkan dalam UU Pemerintahan Daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi daerah yang sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Namun makna bebas dan luas sendiri perlu dimaknai dalam koridor hukum yang bertanggungjawab. Adapun dalam pasal Pasal 10 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan absolut pemerintah pusat adalah hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, sementara kewenangan daerah selain dari enam ranah tersebut. Lebih jelasnya, kewenangan agama yang menjadi domain negara menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, dan bagian tertentu urusan pemerintah lain yang berskala nasional,

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 70.

tidak diserahkan kepada daerah. Intinya adalah daerah tidak berwenang untuk menetapkan peraturan, kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama atau mengatur masalah yang berhubungan dengan urusan agama yang berskala nasional, karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun daerah masih diizinkan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan kebijakan afirmatif. Adapun dalam pembuatan perda sendiri, pemerintah daerah mesti menginduk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dimana perda harus menimbang substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagai acuan dalam merumuskan undang-undang.

Syariat sendiri tidaklah diformalkan sebagai bentuk Undang-undang yang dibakukan secara menyeluruh oleh negara. Kata syariat sendiri (secara makro di Indonesia) sifatnya masih komplementari dan pilihan alternatif dalam sistem hukum nasional seperti perbankan syariat maupun ekonomi syariat. Syariat sendiri diakui eksistensinya menjadi produk hukum dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Implementasi syariat dalam tingkat nasional benar-benar akan terwujud kalau negara juga mengakui syariat dalam bidang hukum pidana maupun dalam politik negara.

Meskipun syariat tidak menjadi hukum baku, namun konteks negara hukum (*rechstaat*) tetap saja mengakui hak umat muslim sebagai bagian dari warga negara

untuk menjalankan kewajiban syariat. Pengakuan dan toleransi ruang yuridis yang dimaksudkan tersebut hanya terbatas pada dimensi hubungan vertikal, sosial, maupun ekonomi dan bukan merambah kepada ranah politik dan pidana. Hak konstitusional umat muslim menjalankan syariat termaktub dalam peraturan nasional maupun Internasional. Misalnya dalam skala nasional: pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 jelas menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴¹ Adapula dalam skala internasional, berupa jaminan terhadap *freedom of Expression, freedom of Association, freedom of Religion, Freedom from Fear* sebagaimana dalam *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) 1966 dimana Indonesia juga ikut meratifikasi dan bersedia menerapkannya.⁴²

Dalam perspektif positifistik konstitusional, istilah perda syariat sendiri tidaklah diakomodir eksistensinya secara eksplisit. Keberadaannya tidaklah didiferensiasikan dengan perda-perda lain pada umumnya. Dalam tataran hukum positif, produk legal formal pemerintah daerah berupa perda saja tanpa spesifikasi atau spesialisasi dengan tambahan kata syariat. Dalam ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2011

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab XI, pasal 29.

⁴²Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 8.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga tidak mengenal istilah perda syariat, melainkan hanya peraturan daerah (perda). Hanya saja jika perda-perda tertentu diklasifikasikan berdasarkan konten dan substansinya, maka jelaslah akan ditemui kelompok perda-perda yang mengacu pada positifikasi hukum atau syariat Islam. Sebagaimana di Kabupaten Takalar, misalnya terkait Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Ketiga Peraturan Daerah tersebut tidaklah secara eksplisit dikategorikan sebagai perda syariat oleh sistem hukum kita di Indonesia. Akan tetapi konten dan substansinya jelas mengacu pada interpretasi Konstitusi (hukum) dalam arti relatif (*Relative verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti materil (*constitutite in materiele Zin*). Konstitusi dalam arti relatif (*Relative verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti materil (*constitutite in materiele Zin*) adalah konstitusi yang implementasi turunannya terkait erat dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.⁴³ Dalam hal ini tentunya komunitas masyarakat muslim di Kabupaten Takalar sebagai masyarakat mayoritas. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa ketiga peraturan daerah tersebut merupakan representasi dari buah upaya positifikasi hukum atau syariat islam kedalam hukum nasional (dalam

⁴³Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.105.

level Peraturan Daerah), yang selanjutnya deskripsi panjang tersebut cukuplah diwakili oleh frasa Perda Syariat.

Perlu disepakati bersama dalam pembicaraan awal ini, bahwasanya secara positifistik atau *base of the book* eksistensi perda-perda syariat memang tidaklah dikenal dalam *stufen theory* hukum Nasional Indonesia. Akan tetapi secara *das sein* atau *base of the reality*, perda-perda syariat (sebagaimana batasan-batasan interpretasi yang telah disampaikan penulis sebelumnya) jelas telah ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara khusus dalam lingkup pembahasan ini meliputi perda-perda yang lahir dan hidup di Kabupaten Takalar, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

Untuk menganalisis eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam sudut pandang yuridis konstitusional, maka perlu dipisahkan terlebih dahulu antara dimensi yuridis dan dimensi konstitusional dalam memandang eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar ini. Hal ini dimaksudkan agar elaborasi dalam dimensi parsial dapat memudahkan dan memperdalam analisis secara utuh dan komprehensif.

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa membicarakan masalah yuridis adalah identik dengan membicarakan masalah konstitusi. Hal ini menyebabkan banyak sarjana

hukum yang memandang analisis yuridis dan analisis konstitusi merupakan satu keberadaan yang sama. Akan tetapi penulis ingin membatasi proses analisis yuridis sebagaimana Lawrence M. Friedman memandang sistem hukum yang meliputi tiga aspek atau tiga dimensi yang saling mempengaruhi, yaitu: *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Dalam penjabarannya bahwa substansi hukum meliputi segala bentuk *rule* yang bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum. Sedangkan struktur hukum merupakan *skeletal framework, the institutional body of the system*. Adapun budaya atau kultur hukum merupakan *the element of the social attitude and value*, sebuah bentuk dari ragam bentuk *social forces*.⁴⁴

Adapun terkait analisis konstitusional, terbatas kepada pengujian keberlakuan asas hukum *lex superiori derogat lex inferiori* sebagaimana dalam *the stufen theory* ala Hans Kelsen, terkait hubungannya dengan tatanan konstitusi Republik Indonesia.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum atau *Legal Substance* meliputi segala bentuk *rule* yang bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum.⁴⁵ Dalam konteks Perda Syariat di Kabupaten Takalar, *rule* atau peraturan yang dimaksudkan tentunya bersumber dari syariat Islam itu sendiri.

⁴⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). h. 14-15.

⁴⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-15.

Legal Substance atau substansi hukum yang dibahas dalam tulisan ini tentunya meliputi perda-perda yang lahir dan hidup di Kabupaten Takalar, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Sehingga akan dielaborasi melalui perspektif yuridis, aturan-aturan atau *rules* yang bersumber dari syariat Islam yang selanjutnya bertransformasi menjadi kaidah hukum positif yang terakomodir dalam tiga peraturan daerah tersebut. Adapun ketiga perda tersebut jika diekstraksi akan mengerucut pada tiga norma syariat Islam yaitu: kewajiban mampu baca tulis Al-Qur'an, haramnya *khamr* dan kewajiban menutup aurat.

Terdapat kewajiban untuk mampu baca tulis Al-Qur'an bagi para pemeluk agama Islam. Norma dalam syariat Islam ini bertransformasi menjadi kaidah hukum positif dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama umat Islam. Al-Qur'an adalah pedoman hidup menuju kebenaran dan kesejatan yang diimani oleh umat Islam. Sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan prasyarat mutlak untuk dapat

memahami dan menginterpretasikan bahasa Al-Qur'an. Sehingga dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan sebenarnya.

Firman Allah dalam QS. al-Kahfi/18: 27:

وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٧)

Terjemahnya:

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan-mu (Al-Qur'an). Tidak ada (seorangpun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada-Nya.⁴⁶

Juga disinggung dalam ayat lain, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-'Ankabūt/29: 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ... (٤٥)

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab (Al-Qur'an) ...⁴⁷

Menurut Quraish Shihab, kata *أَتْلُ* (*utlu*) terambil dari kata *تلاوة* (*Tilawah*) yang pada mulanya berarti mengikuti. Dalam hal ini yang dimaksudkan mengikuti adalah mengikuti huruf demi huruf sehingga terangkai satu kata dan ditemui maknanya. Kata

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. (Cet. IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013), h. 355.

⁴⁷Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 499.

tersebut digunakan berbeda dengan kata *قراءة* (*Qira'ah*) yang juga mempunyai pengertian serupa. Penggunaan kata *قراءة* (*Qira'ah*) lebih kepada makna general, sedangkan penggunaan kata *اتل* (*utlu*) ditujukan kepada objek bacaan yang bersifat agung, suci dan benar.⁴⁸

Norma yang mewajibkan mampu baca tulis Al-Qur'an tersebut selanjutnya bertransformasi menjadi kaidah hukum positif. Dapat kita lihat pada Pasal 3 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003:

(1) Setiap murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an. (2) Setiap murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam dan akan menamatkan pendidikannya diwajibkan bebas baca tulis Al-Qur'an setelah dinyatakan lulus oleh Tim Munaqis/ Tim Penguji. (3) Susunan Tim Munaqis/ Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.⁴⁹

Dari proses transformasi norma dalam hukum Islam menjadi kaidah hukum positif tersebut dapatlah dicermati bagaimana syariat Islam di akomodir dalam wadah hukum nasional melalui media peraturan daerah.

Elaborasi selanjutnya yaitu terhadap aturan pelarangan (pengharaman) produksi hingga konsumsi minuman keras atau segala jenis *Khamr* dalam ajaran agama Islam yang selanjutnya bertransformasi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 507.

⁴⁹Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, bab III, pasal 3.

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:

حدثنا عبدالله بن منير, قال: سمعت ابا عاصم, عن شبيب بن بشر, عن انس بن مالك, قال: لعن رسول الله ص.م. في الخمر عشرة: عاصرها, ومعتصرها, وشاربها, وحا ملها, والمحمولة اليه, وساقها, وبائعها, واكل ثمنها, والمشتري لها, والمشتراة له. (رواه الترمذي)

Artinya:

Abdullah bin Munir menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Abu Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamer; orang yang memeras atau membuatnya, orang yang meminta diperaskan atau dibuatkan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan hasil penjualannya, orang yang membelinya dan orang yang meminta dibelikan". (H.R. Tirmidzi)⁵⁰

Dalam hadis tersebut diklasifikasikan golongan orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW terkait produksi *khamr*. Golongan terlaknat tersebut diklasifikasikan menjadi: Orang yang memeras atau membuatnya (produsen), orang yang meminta diperaskan atau dibuatkan, orang yang meminumnya (konsumen), orang yang membawanya (distributor), orang yang dibawakan, orang yang menuangkannya, orang

⁵⁰Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 69.

yang menjualnya, orang yang memakan hasil penjualannya, orang yang membelinya dan orang yang meminta dibelikan.

Norma dalam syariat Islam tersebut selanjutnya bertransformasi kedalam kedalam kaidah hukum positif. Dapat kita cermati dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika:

(1) Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah.⁵¹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika tersebut, yang menjadi objek dalam langkah preventif dan represif pemberantasan miras dan narkoba tidak hanya berfokus pada konsumen. Lebih luas, kaidah hukum ini juga menyentuh dimensi produksi dan distribusi. Hal ini tentu diakibatkan oleh karena *legal baseline* dari perda ini adalah norma dalam syariat Islam. Dimana dalam syariat Islam, aturan ketat terhadap haramnya *khamr* bahkan menyentuh lebih luas dari dimensi konsumsi, produksi dan distribusi.

⁵¹Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika*, bab II, pasal 2.

Elaborasi selanjutnya adalah terhadap aturan seputar pembatasan menampakkan aurat. Aturan mengenai batasan-batasan aurat atau aturan berbusana bagi umat Islam dalam koridor syariat Islam tersebut selanjutnya bertransformasi kedalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nūr/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(٣١)

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵²

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksudkan dengan perhiasan yang dilarang untuk dinampakkan kepada selain golongan-golongan yang dihalalkan untuk melihatnya adalah bagian tubuh yang dapat merangsang lawan jenis (dikecualikan wajah dan telapak tangan).⁵³ Selanjutnya menjadi umum diketahui bagi umat Islam bahwa seorang muslimah memiliki aurat yang harus dijaga meliputi seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan. Adapun bagi seorang muslim memiliki aurat yang wajib dijaga adalah sebatas pusar sampai lutut.

Aturan mengenai aturan tata busana bagi umat Islam tersebut selanjutnya bertransformasi dan diakomodir kedalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar. Dapat dicermati misalnya dalam 5 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2006:

Setiap karyawan/karyawati daerah, mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliah, Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah sedangkan bagi masyarakat umum yang beragama Islam bersifat himbauan.⁵⁴

Setelah ketiga elaborasi tersebut, dapatlah ditemui ketiga norma yang bersumber dari syariat Islam selanjutnya bertransformasi menjadi kaidah hukum positif dalam wadah peraturan daerah di Kabupaten Takalar. Sehingga dapatlah dipahami

⁵²Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 493.

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*, h. 326.

⁵⁴Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar*, bab III, pasal 5.

secara utuh alur transformasi terbentuknya *legal substance* atau substansi hukum dalam perda-perda yang lahir dan hidup di Kabupaten Takalar, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Sehingga jelaslah *legal baseline* dari ketiga Peraturan Daerah tersebut.

Idealnya *Legal Substance* dari sebuah *Legal System* dibangun dan lahir dari *Legal Baseline* yang jelas. Produk hukum yang dibentuk tentunya tidak lahir begitu saja. Para perancang perda tentu harus mempunyai alasan yang jelas untuk apa perda tersebut dibuat. Setelah disepakati oleh para penentu kebijakan terkait kejelasan tujuan dibentuknya sebuah substansi hukum, maka perlu diperhatikan pula keterpenuhan asas-asas pembentukan substansi hukum yang baik. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkhusus pada Pasal 5 (lima), mengatur asas-asas yang harus terimplementasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁵⁵

⁵⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bab II, Pasal 5.

Asas-asas tersebut merupakan indikator terhadap baik buruknya proses transformasi norma syariat Islam menjadi kaidah hukum positif. Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, maka dapat diinterpretasikan secara subjektif (perspektif penulis) sejauh mana terimplementasinya asas-asas tersebut dalam proses terbentuknya Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar.

Salah satu asas yang menjadi indikator adalah asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁵⁶ Tentunya kejelasan tujuan sebagaimana diharapkan oleh asas tersebut telah dapat ditemui secara eksplisit dalam ketiga perda yang dibahas dalam tulisan ini. Secara komprehensif ketiga Peraturan Daerah bernuansa syariat Islam ini bertujuan untuk mengentaskan buta aksara Al-Qur'an, memberantas peredaran NAPZA dan mencanangkan aplikasi busana muslim muslimah di Kabupaten Takalar.

⁵⁶Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*. (Makassar: CV. Indomedia, 2013), h. 39.

Asas selanjutnya adalah asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini memaksudkan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum apabila dibuat oleh yang tidak berwenang.⁵⁷ Secara empiris autentik tentunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika telah memenuhi asas tersebut. Dapat dibuktikan dengan berdasar kepada Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 22 Seri E Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2004 Nomor 03 Seri E Nomor 03 dan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2006 Nomor 02. Lembaran-lembaran daerah tersebut sebagai bentuk dokumentasi dan publikasi berbagai kebijakan, pengumuman dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Asas selanjutnya adalah asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Asas ini memaksudkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki

⁵⁷Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*, h. 39.

Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁸ Semakin tinggi kedudukan suatu Peraturan Perundang-undangan maka materi muatannya juga semakin mendasar, umum luas dan cenderung abstrak. Sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu Peraturan Perundang-undangan dalam jenjang hierarki, maka materi muatannya juga semakin rinci, khusus, mengerucut dan cenderung konkret. Misalnya dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tentang jaminan kebebasan tiap-tiap penduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sesuai kedudukannya dalam hierarki Perundang-undangan nasional pasal tersebut bersifat umum. Akomodasi kaidah hukum Islam dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penjaminan kebebasan beribadah yang lebih konkret dan terkhusus bagi umat Islam di Kabupaten Takalar.

Asas berikutnya adalah asas dapat dilaksanakan. Asas ini memaksudkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.⁵⁹ Secara filosofis, efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003

⁵⁸Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*, h. 39.

⁵⁹Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*, h. 40.

Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika dapat dikatakan tidak menemui kendala berarti oleh karena mayoritas penduduk Kabupaten Takalar beragama Islam. Sehingga dogma filosofis masyarakat yang notabene fundamental Islam dapat berjalan beriringan dengan peraturan daerah bernuansa syariat ini. Sedangkan efektivitas perda ini masih dipertanyakan jika diintip dari perspektif sosiologis. Hal ini terkhusus dalam hal Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Lebih khusus lagi terkait minuman keras berjenis *ballo*'. Bagi sebagian masyarakat di sebagian wilayah kabupaten Takalar, konsumsi *ballo*' sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang melekat dan mengakar sehingga amat sulit diberantas.

Asas selanjutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini memaksudkan bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁰ Pemutakhiran sistem hukum menuntut integrasi yang kompleks dari setiap sumber-sumber hukum. Usaha mengintegrasikan hukum-hukum agama yang hidup dalam masyarakat dengan kaidah hukum positif inilah yang

⁶⁰Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*, h. 40.

mendorong dan mendesak lahirnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika sebagai representasi integrasi hukum langit dan hukum bumi.

Asas berikutnya adalah asas kejelasan rumusan. Asas ini memaksudkan bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ada pula asas keterbukaan. Asas ini memaksudkan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan atau terbuka.⁶¹

Demikianlah bagaimana sebuah norma hukum dalam syariat Islam bertransformasi menjadi kaidah hukum positif yang selanjutnya menjadi sebuah *legal substance* dalam sistem hukum nasional.

⁶¹Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*, h. 40.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum atau *Legal Structure* merupakan *skeletal framework, the institutional body of the system*.⁶² Merupakan kerangka yang menopang, membangun dan menjamin dapat tegaknya sebuah bangunan hukum.

Sebagai sebuah dimensi struktural yang berperan membawa substansi hukum dari *das Sollen* menuju *das Sein*, tentunya lembaga penegak hukum menempati ranah yang paling aktif. Terkhusus kepada penegakan peraturan daerah, maka yang kemudian menjadi penting untuk disoroti adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun terkait kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP) dimungkinkan untuk melakukan tindakan penertiban non-yudisial terhadap pelanggaran Perda dan atau Perkada. Tindakan ini berlaku menyeluruh kepada warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum. Selain itu dimungkinkan pula bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap

⁶²Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-15.

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.⁶³

Terkait fungsi koordinasi dan kerjasama, Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian. Sebagaimana dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.⁶⁴

Dari ketiga Peraturan Daerah bernuansa syariat di Kabupaten Takalar, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, maka yang paling membutuhkan koordinasi dan kerjasam antara Satpol PP dan Kepolisian adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi,

⁶³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 255.

⁶⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Bab X Pasal 28.

Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.

Hadirnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *Legal Structure* dalam dimensi Peraturan Daerah tentunya memberikan sebuah bentuk penjaminan terhadap tegaknya Peraturan Daerah itu sendiri.

3. Budaya Hukum

Budaya atau kultur hukum atau *Legal Culture* merupakan *the element of the social attitude and value*. Dalam deskripsi sistem hukum ala Friedman budaya hukum merupakan salah satu elemen yang membangun tegaknya hukum sebagai sebuah sistem. Budaya hukum atau kultur hukum merupakan bentuk ekstraksi akumulasi *legal attitude* dalam masyarakat.⁶⁵ Budaya hukum dapat diamati dari bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku yang mana hal tersebut akan menjadi jawaban atas pertanyaan: apakah norma hukum yang diberlakukan pada masyarakat tersebut memang berangkat dari kultur masyarakat tersebut? Ataukah merupakan bentuk hukum yang dibuat sekedar sebagai alat rekayasa sosial.

Adapun terkait eksistensi Peraturan Daerah bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan

⁶⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-15.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika), bila ditinjau dari sudut pandang budaya hukum maka menjadi mutlak untuk menelaah relasi antara kultur asli masyarakat Takalar (Suku Makassar) dan kulturisasi Hukum Islam menjadi sebuah norma budaya.

Sejak tahun 1650 Islam menjadi agama resmi Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna. Sejak itupula dimulailah kulturisasi budaya peradaban Islam dengan *Legal base line* Syariat Islam. Secara tidak langsung pengaruh kulturisasi tersebut juga menjangkau keseluruhan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa, termasuk wilayah yang kini menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Takalar.⁶⁶

Dalam beberapa abad proses akulturasi budaya dan peradaban Makassar dan Islam menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat Takalar. Adapun dalam kaitannya dengan Perda-perda (bernuansa) Syariat, tentunya hal ini menjadi sebuah jejak yang jelas bahwa kultur hukum masyarakat takalar adalah kultur hukum Islam itu sendiri. Sehingga menjadi utuhlah sinergi antara *legal substance* dan *legal culture* dari Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar ini, oleh karena dibangun diatas *legal baseline* yang sama yaitu Syariat Islam. Meskipun pada perjalanan realisasinya lebih menunjukkan kecenderungan positifikasi gerakan kulturalisasi peradaban Islam di Kabupaten

⁶⁶Sagimun, *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), h. 35.

Takalar daripada sebuah upaya penegakan Syariat Islam secara komprehensif melalui positifikasi norma Hukum Islam.

4. Konstitusionalisme

Pembicaraan yang kerap diangkat terkait topik Perda (bernuansa) Syariat biasanya dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah dimungkinkan pembuatan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat komunal religi dalam tatanan hukum sebuah negara yang penuh keberagaman? Bukankah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara telah mengatur bahwa urusan agama menjadi salah satu dari enam urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat? Bukankah diaturnya perkara agama merupakan sebuah bentuk *overlapping*?

Dalam tulisan ini, meng-generalisasikan seluruh Perda (bernuansa) Syariat dalam sebuah asumsi hukum tentu menjadi sebuah bentuk kelancangan. Akan tetapi, khusus terkait Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika), maka berdasarkan elaborasi penulis dalam perspektif konstitusionalisme, tidaklah ditemui pelanggaran konstitusional dari ketiga Peraturan Daerah yang dimaksud.

Bahwa perkara agama memang merupakan domain Pemerintah Pusat. Namun apa yang diatur oleh Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar bukanlah merupakan bentuk *overlapping* melainkan lebih kepada bentuk pengejawantahan hukum nasional dalam cita rasa kearifan lokal. Maka seharusnya Perda-perda (bernuansa) Syariat tersebut tidak didikotomikan sebagai produk hukum pemerintah daerah yang bersifat komunal religi. Akan lebih bijak jika Perda-perda tersebut dipandang sebagai bentuk ekstraksi aspirasi rakyat lokal yang menuntut diakomodasinya kebutuhan akan bingkai interaksi antropologis dalam bentuk Peraturan Daerah yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokalnya sendiri.

C. Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar dalam Perspektif Politis

1. Landasan Politis

Menurut Sahlan Gasri, S.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, didasari bahwa masyarakat Kabupaten Takalar memiliki populasi muslim yang besar sebagai warga masyarakat mayoritas. Hal ini tentunya membutuhkan produk hukum yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat

muslim di Kabupaten Takalar dalam upaya menjalankan penegakan ajaran dan atau syariat Islam.⁶⁷ Berangkat dari alasan tersebut maka terwujudlah Peraturan-peraturan Daerah yang berusaha mentransformasikan diri sebagai wadah positifikasi syariat Islam.

2. Kontinuitas Implementasi

Berdasarkan hasil observasi penulis, implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika menunjukkan indeks kontinuitas implementasi yang cukup terealisasi dengan beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat dilihat dari masih maraknya peredaran minuman keras tradisional *ballo'* dan keberadaan panggung hiburan rakyat yang masih mempertontonkan hiburan dengan kecenderungan erotisme.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) telah berjalan sekian tahun dan mampu menegaskan eksistensinya sebagai salah satu Peraturan Daerah yang benar-benar berkontribusi di masyarakat. Dapat dilihat secara empiris maupun administratif

⁶⁷Sahlan Gasri (54 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Wawancara, Takalar, 30 Oktober 2014.

bagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) terimplementasi dengan baik:

Setiap murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam dan akan menamatkan pendidikannya diwajibkan bebas baca tulis Al-Qur'an setelah dinyatakan lulus oleh Tim Munaqis/ Tim Penguji.⁶⁸

Demikian pula pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI):

Bebas Baca Tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah atau ujian masuk tingkat SLTP/ Madrasah Tsanawiyah.⁶⁹

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut secara efektif, maka tanda kelulusan atas ujian kelulusan baca tulis Al-Qur'an (yang selanjutnya disebut ijazah TK/TPA) menjadi hal mutlak hadir sebagai prasyarat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya (SMP/MTs) bagi siswa siswi SD/MI yang beragama Islam di Kabupaten Takalar. Implementasi dari Perda ini juga menghasilkan gerakan pemutakhiran pendidikan Al-qur'an yang selama ini hanya terbatas pada pembelajaran membaca Al-qur'an dengan metode *Salafiyah* menjadi metode pendidikan Al-qur'an yang lebih

⁶⁸Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, Bab III, Pasal 3.

⁶⁹Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, Bab III, Pasal 5.

modern dengan kurikulum yang komprehensif. Hal tersebut sangat jelas terasa bagi masyarakat muslim di Kabupaten Takalar, dimana revolusi gerakan pengentasan buta aksara qur'an yang awalnya hanya berlangsung secara parsial konvensional di rumah-rumah *Guru Pangngaji* (Guru mengaji) menjadi gerakan komprehensif TK/ TPA (Taman Kanak-kanak/ Taman Pendidikan Al-qur'an) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai pijakan eksistensinya.

Perda selanjutnya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar. Peraturan Daerah ini telah berjalan sekian tahun dan mampu menegaskan eksistensinya sebagai salah satu Peraturan Daerah yang sedikit banyak telah berkontribusi di masyarakat. Dapat dilihat secara empiris maupun administratif bagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar berjalan:

Setiap karyawan/karyawati daerah, mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah sedangkan bagi Masyarakat umum yang beragama Islam bersifat himbauan.⁷⁰

⁷⁰Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar*, bab III, pasal 5.

Demikian pula pembatasan ruang lingkupnya pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar:

Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada: a. kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan Swasta; b. Sekolah Negeri dan Swasta mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas, SMK, Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi; c. Lembaga-lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.⁷¹

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, maka secara bertahap dimulailah gerakan memasyarakatkan busana muslim muslimah di Kabupaten Takalar. Sehingga sampai saat ini dapatlah dijumpai dan menjadi pemandangan familiar bahwa di setiap Sekolah Menengah, ruang-ruang publik lainnya muslim dan muslimah yang mengenakan busana muslim dan muslimah. Kesan besar perubahan yang dapat diamati secara empiris terutama pada pengenalan jilbab atau hijab oleh para siswi yang beragama Islam di sekolah-sekolah di Kabupaten Takalar. Dimana sebelum diberlakukannya Peraturan Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, mengenakan jilbab atau hijab masih merupakan sebuah pilihan rohani dengan kesadaran maupun tuntutan religius. Akan tetapi pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, maka hal tersebut kini menjadi suatu kewajiban yang bukan hanya mengikat secara religius akan tetapi mengikat pula secara yuridis.

⁷¹Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar*, bab III, pasal 6.

Bahkan sekarang siswa siswi di Sekolah Dasar pun telah menerapkan pengenaaan busana muslim dan muslimah sebagai refleksi dari penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar.

Berjalannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar masih menyisakan beberapa kekurangan. Kelemahan Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada lemahnya implementasi dari Pasal 11 huruf d. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, yaitu:

Bagi masyarakat yang mengadakan pesta sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi dengan menghentikan pelaksanaan hiburan tersebut.⁷²

Padahal telah ditegaskan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar, bahwa:

Bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta perkawinan/khitanan dan sejenisnya yang diiringi dengan hiburan dengan tujuan menghibur masyarakat maka diwajibkan membuat pernyataan sanggup menampilkan busana muslim atau pakaian yang menutup aurat.⁷³

Efektivitas implementasi Pasal 6 ayat (3) Perda No. 02 Tahun 2006 tentang busana Muslim Muslimah dalam kaitannya dengan hiburan panggung publik di masyarakat (seperti Orkes, *Electone* dsb) memang masih minim. Diakui oleh Sahlan Gasri, S.H., (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar) bahwa

⁷²Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar*, bab IV, pasal 11.

⁷³Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar*, bab III, pasal 6.

terbatasnya daya pengawasan menjadi titik lemah implementasi Pasal ini. Namunpun demikian, surat pernyataan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar tetap menjadi salah satu persyaratan untuk dikeluarkannya izin.⁷⁴

Perda selanjutnya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Ditinjau dari perspektif efektivitas implementasi Diantara ketiga Peraturan Daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika inilah yang paling lemah tingkat implementasinya.

Sebagaimana diharapkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, yang berbunyi:

Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah.⁷⁵

Pada kenyataannya proses produksi miras masih berjalan dengan begitu leluasa. Terkhusus kepada minuman keras berjenis *ballo* ' atau tuak yang merupakan minuman

⁷⁴Sahlan Gasri (54 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Wawancara, Takalar, 30 Oktober 2014.

⁷⁵Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika*, bab II, Pasal 2.

keras tradisional suku Makassar yang merupakan pribumi Kabupaten Takalar. Bukanlah perkara sulit untuk menemukan produsen atau penjual *ballo* di Kabupaten Takalar. Meskipun sebenarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika ini cukup efektif mengendalikan peredaran narkotika dan miras jenis pabrikan. Akan tetapi harus diakui bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika ini tidak berkuat terhadap minuman keras lokal yaitu *ballo*.

Menurut Sahlan Gasri, S.H., (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar), hilangnya taji Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika dalam menghadapi hegemoni *ballo* dikarenakan produk ini telah mengalami proses kulturisasi seiring kronologi peradaban kebudayaan masyarakat Takalar. Hal inilah yang membuat *ballo* menjadi lekat dengan aktifitas interaksi sosial bagi sebagian kelompok masyarakat di Kabupaten Takalar.

Hambatan mutlak adanya dalam penegakan hukum. Benturan dengan kultur salah satunya. Akan tetapi bukanlah sebuah alasan untuk lemahnya determinasi penegakan hukum. Apalagi ditunjang dengan dukungan Syariat Islam dengan semangat yang sama. Tentunya menjadi tantangan bagi penegakan supremasi hukum di Kabupaten Takalar untuk kedepannya memperjuangkan tegaknya Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi
Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.



BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan terkait eksistensi Perda-perda Syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis, politis dan konstitusional. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Yuridis Konstitusional
 - a. Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika) dari segi *legal substance* atau substansi hukum merupakan bentuk positififikasi norma yang bersumber dari hukum Islam menjadi kaidah hukum positif.
 - b. Ditinjau dari segi *legal structure* atau struktur hukum, perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras

Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika) secara legal ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Kepolisian.

- c. Ditinjau dari segi *legal culture* atau kultur hukum, eksistensi Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika) didukung oleh kultur dan budaya masyarakat Takalar yang cenderung religius oleh karena hasil akulturasi peradaban Makassar dan Islam.
- d. Berdasarkan elaborasi penulis, tidak ditemui pelanggaran konstitusional atas eksistensi perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika).

2. Perspektif Politis

- a. Landasan politis atas lahirnya Perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an

Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika) didasari inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk mengakomodir aspirasi bersyariat masyarakat Takalar yang mayoritas beragama Islam.

- b. Kontinuitas implementasi perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika) telah menegaskan eksistensinya dengan penegakan yang berkelanjutan.
- c. Kekurangan dalam pelaksanaan perda-perda tersebut dapat ditemui pada lemahnya penegakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika dan Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar.

E. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang mencakup pada dua hal, yakni implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusi penelitian ini bagi perkembangan teori-teori hukum tata negara dan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian terhadap penguatan implementasi Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Takalar dan penegakan hukum secara umum.

1. Implikasi Teoritis

- a. Menghadirkan perspektif baru terkait Peraturan Daerah (bernuansa) Syariat. Dimana selama ini pendekatan yang digunakan kebanyakan ahli hukum tatanegara lebih kepada perspektif positivis (hukum murni) sehingga menutup mata terkait eksistensi Perda (bernuansa) Syariat. Bahwa benar secara positivistik Perda Syariat tidaklah dikenal dalam pergaulan hukum nasional. Akan tetapi Peraturan Daerah dengan nuansa dan berangkat dari norma Syariat adalah benar pula adanya dan nyata eksistensinya;
- b. Menghadirkan perspektif baru terhadap *base line* Perda (bernuansa) Syariat di Kabupaten Takalar bukan sebatas berasal dari ajaran agama Islam, melainkan juga berasal dari produk akulturasi dan kulturisasi peradaban Makassar-Islam;

2. Implikasi Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Takalar agar penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

di Kabupaten Takalar dapat dijalankan secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup keberlakuannya.

- b. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Takalar agar penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika dapat benar-benar dilaksanakan secara komprehensif dan tidak parsial serta tidak bersifat sporadis semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abī Dāwud, al-Khāfizu Sulaimān Ibnu al-Asy'as al-Zajastāni al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Suriah: Dārul Hadīs, 1973.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizy, Qodry. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Badan Pusat Statistik. "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," *Situs Resmi Badan Pusat Statistik (BPS)*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/table?tid=321&wid=7300000000> (30 Maret 2013).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. *Kabupaten Takalar dalam Angka 2008*. Takalar: BAPPEDA, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013*. Takalar: BAPPEDA, 2013.
- Bahrūn. *Terjemah Tafsīr Jalalain & Asbāb Nuzūl*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Bin fauzan, Shālih. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*. Terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqh lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Imaanstar. *Bukhāri, Muslim, Mālik, & Abū Dawūd Hadith Collection*. [software] Southern California: MSA, 2006.
- Jimung, Martin. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Dikutip dalam Hendra Karianga. *Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-Undangan)*. Makassar: CV. Indomedia, 2013.
- Junadi, Yudi. *Relasi Agama dan Negara: Redefenisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, Cet. IV. Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013.
- Kiddler, Louise. *Research Methods in Social Relation*. Dikutip dalam Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XII. Bandung: Alfabeta, 2005.
- M. Sewang, Ahmad dan Syamsudduha Saleh. *Hubungan Agama dan Negara (Studi Pemikiran Buya Hamka)*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Pemerintah Kabupaten Takalar. *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 13 Tahun 2003 Tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)*.
- Pemerintah Kabupaten Takalar. *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2004 tentang Larangan memproduksi, Mengedarkan Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika*.
- “Peraturan Daerah.” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) (13 April 2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

Sagimun, *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

“Syariat Islam.” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam (13 April 2014).

Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*, Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Harsono. *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Widarta. *Cara Mudah Memahami Otonomi daerah*. Dikutip dalam Hendra Karianga. *Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

KUESIONER WAWANCARA

A. Pengantar

Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang mana jawaban atas pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai bahan (data) dalam penelitian, mengenai: **Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)**. Oleh karena itu, diharapkan kepada responden kiranya dalam menjawab pertanyaan dapat se-objektif mungkin.

B. Responden

Nama : SAHLAN GASRI, S.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : MAKASSAR, 5 APRIL 1960
 Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM
 NIP : 1960050919353021

C. Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa landasan politis (kebijakan) lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003, No. 02 Tahun 2004 dan No. 02 Tahun 2006?	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi muslim yang mayoritas - kebutuhan masyarakat - lahirnya perda-perda tersebut didasarkan bahwa masyarakat kab. Takalar yang mayoritas muslim butuh diakomodir aspirasinya terkait pelaksanaan penegakan ajaran / syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah.

2.	<p>Bagaimana pendapat Anda terhadap kesan lemahnya implementasi Pasal 2 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2004 terkait pemberantasan miras?</p>	<p>Tersangsai kultur dan kondisi ekonomi produsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sudah menjadi rahasia publik bahwa kultur orang Makassar itu lekat dengan yang namanya Ballo', sehingga khususnya di kabupaten Takalar perintisan antara kultur atau kebiasaan ini dengan aturan yang melarangnya yang mengakibatkan implementasi pasal tersebut terkesan lemah.
3.	<p>Apakah telah ada contoh penegakan pasal 7 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2004?</p>	<p>Telah banyak penegakan dilaksanakan "diutamakan persuasif dan pada Represif.</p>

4.	Seberapa efektif implementasi Pasal 6 ayat (3) Perda No. 02 Tahun 2006 tentang busana Muslim/Muslimah dalam kaitannya dengan hiburan panggung publik di masyarakat (seperti Orkes, <i>Electone</i> dsb.)?	<p>cukup efektif meskipun masih perlu ditingkatkan dalam dimensi pengawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - penerapannya tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus bertahap. - Sejak adanya perda ini setidaknya para penonton sudah lebih sopan dan tertutup, meskipun masih ada beberapa kasus yang lepas dari pengawasan. - Selain pengawasan jumlah acara juga diharuskan minimal pernyataan maupun memenuhi syarat yang ditetapkan perda sebelum dilaksanakannya izin.
5.	Apakah telah ada contoh penegakan pasal 11 ayat (3) Perda No. 02 Tahun 2006?	<p>Pernah dilaksanakan dengan koordinasi instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan acara hiburan yang melanggar perda tersebut. - Pemerintah melalui instansi terkait akan terus memantau dan menindakan sesuai setiap laporan yang masuk.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALA UDDIN
M A K A S S A R

Takalar, 30 Oktober 2014

Responden,

Peneliti,


 SAHLAN GASRI, S.H.
 NIP. 196005091985 3021


 Abdurrahman Supardi Usman
 NIM. 10500111005

KUESIONER

OBSERVASI

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
A.	Perda Kab. Takalar No. 02 Tahun 2006		
1.	Apakah Pasal 5 Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar terimplementasi?	✓	
2.	Apakah Pasal 6 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar terimplementasi?	✓	
3.	Apakah Pasal 6 ayat (3) Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar terimplementasi?	✓	
4.	Apakah Pasal 11 huruf d. Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar terimplementasi?		✓
B.	Perda Kab. Takalar No. 02 Tahun 2004		
5.	Apakah Pasal 2 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2004 Kab. Takalar terimplementasi?		✓
C.	Perda Kab. Takalar No. 13 Tahun 2003		
6.	Apakah Pasal 3 ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2003 Kab. Takalar terimplementasi?	✓	
7.	Apakah Pasal 5 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2003 Kab. Takalar terimplementasi?	✓	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Takalar, 27 Oktober 2014



Abdurrahman Supardi Usman
NIM. 10500111005

Lampiran bunyi pasal dan ayat dalam kuesioner:

- Pasal 5 Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar:

“Setiap karyawan/karyawati daerah, mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliah, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama Islam diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah sedangkan bagi Masyarakat umum yang beragama Islam bersifat himbauan”.

- Pasal 6 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar:

“Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada:

- a. kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan Swasta
- b. Sekolah Negeri dan Swasta mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas, SMK, Madrasah Aliah (MA) dan Perguruan Tinggi
- c. Lembaga-lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah”

- Pasal 6 ayat (3) Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar:

“Bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta perkawinan/khitanan dan sejenisnya yang diiringi dengan hiburan dengan tujuan menghibur masyarakat maka diwajibkan membuat pernyataan sanggup menampilkan busana muslim atau pakaian yang menutup aurat.”

- Pasal 11 huruf d. Perda No. 02 Tahun 2006 Kab. Takalar:

“Bagi masyarakat yang mengadakan pesta sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi dengan menghentikan pelaksanaan hiburan tersebut.”

- Pasal 2 ayat (1) Perda No. 02 Tahun 2004 Kab. Takalar:

“Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah.”

- Pasal 3 ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2003 Kab. Takalar:

“Setiap murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam dan akan menamatkan pendidikannya diwajibkan bebas baca tulis Al-Qur'an setelah dinyatakan lulus oleh Tim Munaqis/ Tim Penguji.”

- Pasal 5 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2003 Kab. Takalar:

“Bebas Baca Tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah atau ujian masuk tingkat SLTP/ Madrasah Tsanawiyah.”



Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin

Di

Makassar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman Supardi Usman
NIM : 10500111005
Fakultas : Syari'ah & Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

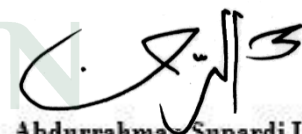
Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013;
2. Eksistensi Perda-perda Syari'ah di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional);
3. Relevansi konfigurasi Negara Federal di Indonesia.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Pemohon,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Abdurrahman Supardi Usman
NIM : 10500111005



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2014

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2014**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disarai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
 - Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk saudara : 1. Akkam Jayadi, S.H., M.H.
: 2. Dra. M. Tahir Maleko, M.HI.

Sebagai pembimbing mahasiswa:

Nama : Abdurrahman Supardi Usman
NIM : 10500111005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Existensi Perda-perda Syariah di Kabupaten Takalar (Analisis Fiqih, Politik dan Konvensional)*

- Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNEP UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 23 Mei 2014



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 195704141986031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sit. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/ /2014
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Abdurrahman Supardi Usman/ 10500111005

Kepada Yth;

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. | Sebagai Pembimbing |
| 2. Drs. M. Tahir Maloko, M.H.I. | Sebagai Pembimbing |

Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2014
 Waktu : 13.00 WITA - selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah, Lantai 2.
 Judul Skripsi : "*Eksistensi Perda-perda Syariah di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politik dan Konstitusional)*".

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 28 Mei 2014

Wassalam,
 Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.
 NIP. 196104041993031005

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)

Samata, 27 Juni 2014


Penyusun,



Abdurrahman Supardi Usman

NIM: 10500111005

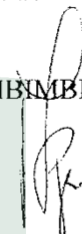
PEMBIMBING I



Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

NIP. 1961102411987031003

PEMBIMBING II



Drs. M. Tahir Maloko, M.H.I.

NIP. 106312311995031006

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.

NIP. 1961040419931005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. H. Ali Parman, M.A.

NIP. 195704141986031003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Kampus I Jl. St. Alauddin No. 63 Makassar tlp. (0411) 864924 Fax. 864923
 Kampus II Jl. St. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. 424831 Fax. 424831

Nomor: SI.I/PP.00.99/ /2014

Samata, Oktober 2014

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : *Pemohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPM Provinsi Sul-Sel

Di -

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : ABDURRAHMAN SUPARDI USMAN
 NIM : 10500111005
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Takalar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

***"Eksistensi Perda-Perda Syariah di Kabupaten Takalar
 (Analisis Yuridis, Politik dan Konstitusional)"***

Dengan dosen pembimbing :

1. Akkam Jayadi, S.H., M.H.
2. Drs. M. Tahir Maleko, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharpkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Daerah Kabupaten Takalar, Bagian Hukum dan HAM terhitung mulai tanggal 20 – 31 Oktober 2014.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.



Prof. Dr. H. Ali Parman, M. Ag
 NIP.195704141986031003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
 Jln. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 16 Oktober 2014

Kepada

Nomor : 14212/PZT-BKPM/19.36P/10/VII/2014

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Takalar

di-
Takalar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1038/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : **Abdurrahman Supardi Usman**
 Nomor Pokok : 10500111005
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"EKSISTENSI PERDA-PERDA SYARIAT DI KABUPATEN TAKALAR (ANALISIS YURIDIS, POLITIS DAN KONSTITUSIONAL)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Oktober s/d 17 November 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

H. IRMAN YASIN LIMPO, SH.
 Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP : 19670824 199403 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar tlp. (0411) 864924 Fax. 864923
Kampus II Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. 424835 Fax. 424835

LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul, “Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”, yang disusun oleh Abdurrahman Supardi Usman, NIM: 10500111005, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah kami setuju untuk diajukan pada Sidang Munaqasyah.

Samata, Februari 2015

PEMBIMBING I

Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
NIP. 1961102411987031003

PEMBIMBING II

Drs. M. Tahir Maloko, M.H.I.
NIP. 106312311995031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER *VIII* WISUDA PERIODE *I*
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama : *ABDURRAHMAN SUPARDI UTMAN*
N I M : *10500111005*
Jurusan : *ILMU HUKUM*
Judul Skripsi : *EKISTENSI PERDA-PELDA SYARIAH DI KABUPATEN BAKALAN
(ANALISIS YURIDIS, POLITIK DAN KONSTITUSIONAL)*

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH
MKDU	MKDK	MKKP	KESELURUHAN	RATA-RATA
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikin)			
3	4	3	10	3,33

Makassar, *27 Februari 2015*



Ketua dan Kemahasiswaan,
HESRIANI, S.Sos.,MM.
NIP. 19661019 199503 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jln. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp (0411) 864928 – 864923
Kampus II Jln. Slt. Alauddin No. 36 Samata – Gowa Tlp 424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ W5 /2015
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 6 Maret 2015

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (Ketua Majelis)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum. (Sekretaris)
 3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. (Penguji I)
 4. Rahman Syamsuddin, SH., MH. (Penguji II)
 5. Ahkam Jayadi, SH., MH. (Pembimbing I)
 6. Drs. M. Thahir Maloko, M.HI. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Abdurrahman Supardi Usman
N I M : 10500111005
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2015
Buka Sidang : Pukul 08.00
Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 19570414 198603 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No 63 Makassar Tlp. (0411) 8264924-82418279 Fax. 8264923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No 36 Samata Gowa Tlp. (0411) 4248236 Fax. 8221400

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 115 Tahun 2015
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2015**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
N a m a : Abdurrahman Supardi Usman
N I M : 10500111005
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2015
Perihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Eksistensi Perda-Perda syariah di Kab. Takalar (Analisis Yuridis, Politis, dan Konstitusional) "
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2009 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.
Penguji I : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.
Penguji II : Rahman Syamsuddin, SH., MH.
Pelaksana : 1. Hj. Suryani, S.Sos., MM.
 2. Hj. St. Helmi, SH.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 6 Maret 2015
Dekan,

Prof Dr. H. Ali Parman, MA
NIP. 19570414 198603 1 003

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama : Abdurrahman Supardi Usman
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 01 Maret 1993
 Agama : Islam
 Suku/Bangsa : Makassar, Indonesia
 Ayah : Supardi Usman, S.Ip., M.Si.
 Ibu : Layana

Alamat : Jl. Baso Kaluku Dg. Buang No. 100, Desa Patani
 Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar

Nomor Telepon : +62 853-9912-4067

Alamat Surel : serangrahman@outlook.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK pada tahun 1999, di TK YAPTA Takalar;
2. Tamat SD pada tahun 2005, di SD Negeri No. 138 Inpres Mangulabbe;
3. Tamat SMP pada tahun 2008, di SMP Pesantren Tarbiyah Palleko;
4. Tamat SMA pada tahun 2011, di SMA PGRI Takalar;
5. Terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana S1 Ilmu Hukum pada Tahun 2011, di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

C. Pengalaman Organisasi

1. Gerakan Pramuka;
2. Organisasi Santri Intra Pesantren (OSIP) PMT Takalar;
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);
4. Anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA);
5. Pendiri Independent Law Student (ILS);

6. Kepala Bidang Trisula Independent Law Student (ILS) periode 2013-2014
7. Pendiri Alauddin Debate Association (AlDebA);
8. Presiden Alauddin Debate Association (AlDebA) periode 2013-2014;
9. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI);
10. Anggota Tim Inti Aksi Indonesia Muda (AIM)

D. Prestasi

1. Pendongeng Kawan Cilik (KanCil) TVRI tahun 1998;
2. Juara I Seni Lukis Kab. Takalar tahun 2003, 2004 dan 2005;
3. Juara I kaligrafi Kab. Takalar tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006;
4. Siswa berprestasi Sulawesi Selatan tahun 2004
5. Ranking umum Pesantren Modern Tarbiyah Takalar tahun 2006 dan 2007;
6. Juara III Pidato Bahasa Indonesia Unicef tahun 2007;
7. Juara I Pidato Bahasa Daerah se-Sulselbar, Lentera Bahasa tahun 2008;
8. Juara III Debat se-Sulselbar, Lentera Bahasa tahun 2008;
9. Juara I Debat IT Kab. Takalar tahun 2009;
10. Peserta pemecahan rekor MURI: Barisan Sempore Terpanjang, PERKASA tahun 2009;
11. Juara V Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Sulsel 2009;
12. Juara I Musikalisasi Puisi se-Sulselbar 2009;
13. Pra-semifinalis Jingle Dare 2010;
14. Juara I Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ) Takalar 2010;
15. Delegasi Takalar dalam MTQ Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010;
16. Juara II Pidato Bahasa Indonesia se-Sulselbar, Balai Bahasa tahun 2010;
17. Juara I Pidato Bahasa Daerah se-Sulselbar tahun 2010;
18. Juara I kaligrafi Kontemporer se-Sulselbar tahun 2010;
19. Juara I Cerdas Cermat UU No. 22 Tahun 2009, tahun 2011;

20. Delegasi UIN Alauddin Makassar pada Konfrensi dan Sosialisasi Lembaga dan Insan Debat Seluruh Indonesia (KONSOLIDASI) tahun 2013;
21. Juri pada kompetisi Debat Hukum se-Sulselbar, HMJ Ilmu Hukum UINAM tahun 2013 dan 2014.

